

**PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN
METODE *VALUE FOR MONEY* PADADINAS PENDAPATAN
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



OLEH

NAMA : DEWI ANGGRAINI

NIM : 22 2008 260

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2012**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dewi Anggraini

NIM : 22.2008.260

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palembang.....

Hormat Saya,



Dewi Anggraini

Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN DENGAN
MENGUNAKAN METODE VALUE FOR MONEY
PADA DINAS PENDAPATAN KOTA PALEMBANG**

Nama : **Dewi Anggraini**

NIM : **22 2008 260**

Fakultas : **Ekonomi**

Program studi : **Akuntansi**

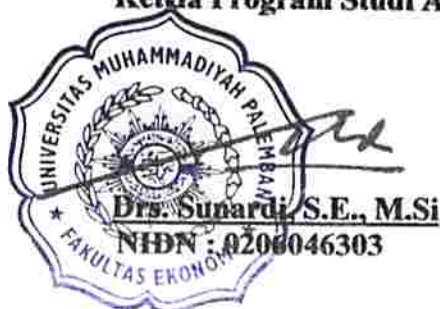
Mata Kuliah Pokok : **Akuntansi Sektor Publik**

Diterima dan Disahkan
Pada tanggal.....
Pembimbing Skripsi



Mizan, S.E., M.Si, Ak
NIDN : 0206047101

Palembang, Agustus 2012
a.n Dekan
Ketua Program Studi Akuntansi



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- ❖ **“Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah anda miliki, Anda harus bersedia melakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan”.**

Terucap syukur pada-MU Allah SWT,

Kupersembahkan kepada :

- 1. Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- 2. Saudara-saudara Ku Tersayang**
- 3. Sahabat-sahabatku terkasih**
- 4. Almamaterku**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil Alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, rahmat dan hidayah serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Rasio Keuangan dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Palembang”. Tidak lupa pula shalawat serta salam untuk Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tuaku, saudara-saudara ku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Mizan, S.E, M.Si, Ak yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu penulis ingin menyampaikan pula ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam penyelesaian studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang:

1. Bapak H. M. Idris, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, beserta staff dan karyawan/karyawati,

2. Bapak M. Taufiq Syamsuddin, S.E., Ak., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang,
3. Bapak Drs. Sunardi, S.E., M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Ibu Welly, S.E., M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang,
4. Bapak Mizan, S.E, M.Si, Ak selaku Pembimbing,
5. Bapak dan Ibu Pegawai Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Palembang yang telah membantu memberikan data untuk penulisan skripsi ini.
6. Saudara-saudaraku tersayang.
7. Sahabat - sahabat terbaikku dan Seperjuangan.
8. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian, Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT, aamiin.

Palembang, 2012
Penulis

Dewi Anggraini

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL	x
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Sebelumnya	8
B. Landasan Teori	9
1. Rasio Keuanagan	
a. Pengertian Kinerja dan Pengukuran Kinerja	9
b. Tujuan Pengukuran Kinerja.....	10
2. Pengukuran kinerja Tradisional	
a. Pengertian Kinerja Tradisional.....	11
b. Pengukuran Kinerja Tradisional.....	11
c. Kelemahan Anggaran Tradisional.....	12

3. <i>Value For Money</i>	
a. Pengertian Value For Money	12
b. Konsep Value For Money	13
c. Pengukuran Value For money.....	13

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	16
B. Tempat Penelitian	17
C. Operasionalisasi Variabel	17
D. Data yang diperlukan	18
E. Teknik Pengumpulan Data	19
F. Analisis dan Teknik Analisis	20

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	22
B. Pembahasan	53

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Selisih Data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.....	4
Tabel I.2 Data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang tahun 2009-2011.....	5
Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel	17
Tabel IV.1 Data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang tahun 2009-2011.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1	Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah.....	27
--------------------	---	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Riset
Lampiran 2	Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
Lampiran 3	Sertifikat AIK
Lampiran 4	Sertifikat TOEFL
Lampiran 5	Biodata Penulis

ABSTRAK

Dewi Anggraini/ 22 2008 260/Pengukuran kinerja Dinas Pendapatan daerah kota Palembang dengan menggunakan value for money.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah kinerja dinas pendapatan daerah jika mengukur dengan metode value for money. Tujuannya adalah untuk mengetahui kinerja dinas pendapatan daerah kota Palembang dengan menggunakan metode value for money. manfaat penelitian yaitu bagi penulis, bagi dinas pendapatan daerah dan bagi almamater.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif yaitu deskriptif yaitu jenis penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable tanpa menghubungkan dengan variable lain. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Dalam skripsi ini terdapat variable ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kuantitatif dan teknik analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan penulis menyimpulkan bahwa dinas pendapatan kota Palembang sudah dapat merealisasikan pendapatan daerahnya, karena syarat-syaratnya dapat dipenuhi dan penilaian kinerjanya sudah cukup baik.

Kata kunci : ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

ABSTRACT

Dewi Anggraini / 22 2008 260/ measurement Revenue Service performance Palembang city area by using the value for money.

Formulation of the problem in this study is How performance when measured by the method of value for money. The goal adalah untuk determine the performance of Palembang city Dipenda by using the method value for money. the benefits of research for the author, for services and revenue for the university.

This study includes a descriptive type of research that is descriptive is the type of research conducted untuk know the value of variable without connecting with another variable. The data used are the primary data and secondary data, data collection techniques in this study using interviews and dokumentasi. In this thesis there are economic variables, efisiensi and effectiveness. Analysis technique used is the technique of quantitative analysis and qualitative analysis techniques.

Based on the results of research and analysis has been done the authors concluded that the revenue department has been able to realize the city of Palembang local income, because its terms are met and the assessment of its performance is quite good.

Key words: economy, efficiency and effectiveness.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama ini sektor publik tidak luput dari tuduhan sebagai sarang korupsi, kolusi, nepotisme, inefisiensi dan sumber pemborosan negara. Keluhan “birokrat tidak mampu berbisnis” ditunjukkan untuk mengkritik buruknya kinerja perusahaan-perusahaan sektor publik. Pemerintah sebagai salah satu organisasi sektor publik tidak luput dari tuduhan ini. Pengukuran kinerja adalah faktor penting di dalam suatu organisasi, termasuk juga untuk organisasi sektor publik. Sejauh ini, pengukuran kinerja yang digunakan oleh organisasi sektor publik, adalah pengukuran kinerja yang tradisional. Metode ini memusatkan pada aspek keuangan saja, Sedangkan Penelitian ini menganalisis pengukuran kinerja pada keuangan dinas pendapatan yang merupakan salah satu dari organisasi sektor publik di Kota Palembang, dengan metode *Value for Money*. Dengan menggunakan metode ini, aspek yang diukur yaitu Ekonomis, Efisiensi, Efektivitas.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang didasari UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, sejak tahun 2001 berakibat pada perubahan dalam sistem pembuatan keputusan terkait dengan pengalokasian sumber daya dalam anggaran pemerintah daerah. Sebelumnya pendekatan

penentuan alokasi lebih mengacu pada realisasi anggaran tahun sebelumnya dengan sedikit peningkatan (*incremental*) tanpa merubah jenis atau pos belanja (*line-item*).

Pemberian otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab kepada daerah, sekaligus juga membuka peluang dan tantangan bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kesanggupan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk lebih cerdas dalam memanfaatkan dan mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya.

Seiring dengan munculnya tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor publik mempertahankan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik serta *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya, maka diperlukan pengukuran terhadap organisasi sektor publik tersebut. Menurut Mardiasmo (2002:4) *value for money* merupakan pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu : ekonomi, efisiensi, efektivitas.

Kinerja suatu organisasi dinilai baik jika organisasi yang bersangkutan mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. Kinerja yang baik bagi suatu organisasi dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh organisasi yang bersangkutan dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

oleh organisasi yang bersangkutan dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Pemerintah daerah sebagai salah satu instansi sektor publik mempunyai kewenangan besar dalam mengelola sumber daya publik di daerahnya masing-masing serta bertanggung jawab kepada daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah masing-masing. Untuk meningkatkan pendapatan daerah sering dilakukan perluasan dan penjarangan wajib pajak. Penerimaan pajak dan retribusi daerah dapat meningkatkan penerimaan daerah.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang adalah suatu instansi yang bertujuan untuk mengumpulkan penerimaan dan pengeluaran asli daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya guna untuk pembangunan daerah. Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang belum melaksanakan pembuatan anggaran yang digunakan untuk pengukuran kinerja keuangan maupun sebagai alat untuk mengambil suatu keputusan.

Dibawah ini dapat dilihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Palembang :



Tabel I.1
Selisih Data Realisasi Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun 2009 – 2011

No	Keterangan	2009	2010	2011
1	Pendapatan Daerah Total Pendapatan Daerah	1.336.735.285.945,76	1.321.813.597.628.69	1.694.695.069.057,37
2	Belanja Daerah Total Belanja Daerah Surplus/(Defisit)	1.386.969.127.520,54 (50.233.841.574,78)	1.367.259.209.521,98 (45.445.611.893,29)	1.671.833.519.057,37 22.861.550.000,00

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah, 2012

Tabel 1.2
Data Realisasi Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun 2009 - 2011

No	Keterangan	2009	2010	2011
1	Pendapatan Daerah PAD	218.592.661.810,00	224.461.341.146,00	263.010.453.040,69
	• Pajak Daerah	87.485.932.360,00	91.500.000.000,00	146.570.109.735,00
	• Retribusi Daerah	64.629.000.000,00	68.237.902.273,00	62.795.550.515,69
	• Hasil Pengolahan Kekayaan daerah yang dipisahkan	10.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.570.000.000,00
	• Lain-lain pendapatan yang sah	56.477.729.450,00	39.723.438.873,00	28.074.792.790,00
	Dana Perimbangan	963.652.734.054,00	954.950.317.468,00	1.078.538.834.199,00
	• Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	262.774.112.054,00	229.936.278.468,00	243.246.554.199,00
	• Dana Alokasi Umum	689.108.622.000,00	696.587.039.000,00	787.613.180.000,00
	• Dana Alokasi Khusus	11.770.000.000,00	28.427.000.000,00	47.679.100.000,00
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	154.489.890.081,76	142.401.939.014,69	353.145.781.817,68
	Total Pendapatan Daerah	1.336.735.285.945,76	1.321.813.597.628,69	1.694.695.069.057,37
2	Belanja Daerah			
	a. Belanja Tidak Langsung	737.408.563.105,12	754.819.310.653,00	957.702.235.580,69
	1) Belanja Pegawai	716.177.659.105,12	735.772.310.653,00	916.264.660.580,69
	2) Belanja Hibah	2.100.000.000,00	2.675.000.000,00	26.651.075.000,00
	3) Belanja Bantuan Sosisal	18.141.000.000,00	15.732.000.000,00	13.786.500.000,00
	4) Belanja Tak Terduga	989.904.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	b. Belanja Langsung	649.560.564.415,42	612.439.898.868,98	714.131.283.476,68
	1) Belanja Pegawai	102.470.541.692,00	79.263.758.194,14	73.254.918.876,00
	2) Belanja Barang dan Jasa	267.583.104.148,11	285.131.540.122,28	366.234.550.330,68
	3) Belanja Modal	279.506.918.575,31	248.044.600.552,56	274.641.814.270,00
	Total Belanja Surplus/(Defisit)	1.386.969.127.520,54 (50.233.841.574,78)	1.367.259.209.521,98 (45.445.611.893,29)	1.671.833.519.057,37 22.861.550.000,00

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah, 2012

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah agar masyarakat mau membayar pajak dan retribusi daerah sebaiknya pemerintah daerah meningkatkan manajemen yang lebih baik. Selama ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang mengukur kinerja keuangan hanya melihat dari laporan keuangan saja.

Untuk itulah diperlukan suatu alat ukur untuk mengukur bagaimana kinerja pemerintah dalam mengelola keuangannya serta untuk mengetahui apakah sumber daya organisasi telah diperoleh dan digunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif, agar terciptanya transparansi dan akuntabilitas. Maka digunakan dengan metode *value for money*.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“Pengukuran Kinerja Keuangan dengan menggunakan *Value For Money* Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah kinerja Keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang jika diukur dengan menggunakan metode *value for money* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dengan menggunakan metode *value for money* ?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan mengenai pengukuran kinerja Dinas Pendapatan Daerah.

2. Bagi Dinas Pendapatan Daerah

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu masukan dan pertimbangan bagi Dinas Pendapatan Daerah untuk mengambil kebijakan dalam mencapai tujuan secara ekonomis, efisien dan efektif.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian yang sama dimasa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dengan judul “Pengukuran Kinerja Berdasarkan *Value For Money* pada Dinas Pendapatan Daerah Prabumulih dilihat dari Penerimaan Pajak Hiburan” (Gianisti Permata Sari, 2009). Perumusan Masalahnya adalah bagaimanakah kinerja berdasarkan *value for money* pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Prabumulih dilihat dari Penerimaan Pajak Hiburan.

Operasionalisasi variabel pada penelitian ini terdapat dua variabel yaitu kinerja dan pajak hiburan. Penelitian ini termasuk penelitian Deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data dan teknik analisis menggunakan kualitatif dan kuantitatif.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu objek penelitian, yang mana penelitian sebelumnya dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Prabumulih. Sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Operasionalisasi variabel penelitian sebelumnya terdapat dua variabel yaitu pengukuran kinerja dan pajak hiburan, sedangkan penelitian sekarang terdapat satu variabel yaitu pengukuran kinerja dengan *value for money*.

B. Landasan Teori

1. Kinerja dan Pengukuran Kinerja

a. Pengertian Kinerja dan Pengukuran Kinerja

Indra Bastian (2006:274), Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertung dalam perumusan skema strategi suatu organisasi.

Mahsun (2006:25), pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas : efisien penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan), hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, efektif tidak dalam mencapai tujuan.

Jadi pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

b) Tujuan Pengukuran Kinerja

Secara umum, menurut Mardiasmo (2002:121) ada empat tujuan sistem pengukuran kinerja, yaitu :

- 1) Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (*top down* dan *bottom up*)
- 2) Untuk mengukur kinerja finansial dan non – finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi.
- 3) Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai *goal congruence*.
- 4) Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Berdasarkan tujuan pengukuran kinerja diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja bertujuan untuk memberikan motivasi kepada personal perusahaan untuk melakukan tugasnya sebaik mungkin dan mengakomodasikan strategi – strategi perusahaan agar dapat mencapai hasil yang diinginkan perusahaan.

2) Pengukuran Kinerja Tradisional

a) Pengertian Kinerja Tradisional

Kinerja Tradisional adalah terkait dengan tidak adanya perhatian terhadap konsep value for money. Dalam anggaran tradisional konsep ekonomi, efisiensi dan efektivitas seringkali tidak dijadikan pertimbangan dalam penyusunan anggaran tradisional. Dengan tidak adanya perhatian terhadap konsep value for money ini, seringkali pada akhir tahun anggaran terjadi kelebihan anggaran yang pengalokasiannya kemudian dipaksakan pada aktivitas-aktivitas yang sebenarnya kurang penting untuk dilaksanakan.

b) Pengukuran kinerja Tradisional

Kinerja tradisional merupakan pendekatan yang banyak digunakan di Negara berkembang. Terhadap dua cirri utama dalam pendekatan ini adalah:

(1) *Incrementalism*

Hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya tanpa dilakukan kajian yang mendalam.

(2) *Line- item*

Ciri anggaran tradisional adalah struktur anggaran bersifat line-item yang didasari atas sifat (nature) dari penerimaan dan pengeluaran. Metode line- item budget tidak memungkinkan

untuk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran yang telah ada dalam struktur anggaran, walaupun sebenarnya secara riil item tertentu sudah tidak relevan lagi untuk digunakan pada periode sekarang.

c) Kelemahan Anggaran Tradisional

Menurut Mardiasmo (2002: 78)

- (1) Hubungan yang tidak memadai (terputus) antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang.
- (2) Pendekatan incremental menyebabkan sejumlah besar pengaruhan tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya.
- (3) Lebih berorientasi pada input dari pada output.
- (4) sekat- sekat antar departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai.
- (5) Proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal/ investasi.

3) *Value for Money*

a) *Pengertian Value For Money*

Value For Money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintahan tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama –



sama. Bahkan untuk beberapa hal perlu ditambahkan pengukuran distribusi dan cakupan layanan (*equity & service coverage*) Permasalahan yang sering dihadapi oleh pemerintah dalam melakukan pengukuran kinerja adalah sulitnya mengukur output, karena output yang dihasilkan tidak selalu berupa output yang berwujud, akan tetapi lebih banyak yang berupa *intangible output*.

b) Konsep Value for Money

Kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik dewasa ini adalah ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas publik. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggung jawaban mengenai pelaksanaan *Value For Money*, yaitu ekonomi (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya, dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya di maksimalkan (*maximizing benefits and minimizing cost*) serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

c) Pengukuran Value for Money

Ketiga pokok dalam bahasan *value for money* yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas sangat terkait satu dengan yang

lainnya. Mahsun (2006:186) adapun teknik pengukuran *value for money* adalah :

(1) Tingkat ekonomi

Mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah.

$$\text{Tingkat ekonomis} = \frac{\text{Realisasi pengeluaran}}{\text{Anggaran pengeluaran}} \times 100 \%$$

Kriteria ekonomi adalah :

- Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100$) berarti ekonomis.
- Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100$) berarti ekonomis berimbang.
- Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100$) berarti tidak ekonomis.

(2) Tingkat Efisiensi

Mengukur tingkat *input* dari pemerintah sektor publik terhadap tingkat *output* sektor publik.

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan}}{\text{Realisasi pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria efisiensi :

- Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100$) berarti efisiensi.
- Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100$) berarti efisiensi berimbang.
- Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100$) berarti tidak efisiensi.

(3) Tingkat Efektifitas

Mengukur tingkat output dari pemerintah sektor publik terhadap target-target pendapatan sektor publik.

$$\text{Tingkat efektifitas} = \frac{\text{Realisasi pendapatan}}{\text{Anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria efektifitas adalah :

- Jika diperoleh diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100$) berarti efektif.
- Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100$) berarti efektif berimbang.
- Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100$) berarti tidak efektif.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menurut Sugiyono (2006:11) ada tiga jenis yaitu :

1 Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih variabel (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

2 Penelitian komparatif

Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan, yang variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri tetapi lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.

3 Penelitian Asosiatif

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel tanpa menghubungkan dengan variabel lain.

B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang beralamat di jalan Merdeka No. 21 Palembang.

C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi Variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Pengukuran Kinerja dengan <i>Value For Money</i>	Suatu proses penilaian yang dilakukan untuk menilai kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui alat ukur yang berdasarkan tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.	<i>Value For Money</i> Ekonomis : -Realisasi Pengeluaran -Anggaran Pengeluaran Efisiensi : Realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan Efektivitas : Realisasi Anggaran Pendapatan
Pengukuran kinerja dengan cara Tradisional	Suatu proses penilaian yang hanya melihat laporan keuangannya dari tahun ke tahun.	<i>Incrementalism</i> <i>Line - item</i>

Sumber : Penulis, 2012

D. Data yang Diperlukan

Menurut Indriantoro (2004:146) dilihat dari cara memprolehnya data terdiri dari :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (bukan melalui media perantara)

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti yang tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dari orang lain).

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dimana data primer berupa data yang langsung dapat dari dinas pendapatan daerah kota Palembang. Data skunder yang berupa Data Realisasi Pendapatan Daerah Kota Palembang tahun 2009-2011.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nan lin (dalam W. Gulo 2002:116) teknik pengumpulan data terdiri dari:

1. Pengamatan

Pengamatan (Observasi) adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.

2. Survey

Survey adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan instrumen untuk menerima tanggapan dari responden tentang sampel

3. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden

4. Kuesioner

Kuesioner adalah pertanyaan yang disusun dalam kalimat tanya

5. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Wawancara yaitu dengan cara berkomunikasi secara langsung antara peneliti dengan pihak yang berwenang. Dokumentasi yaitu dengan cara menyalin atau fotocopy dokumen-dokumen yang ada teori-teori yang berhubungan dengan Penelitian ini.

F. Teknik Data dan Teknik Analisis

Menurut M. Iqbal (2003:32) menyatakan bahwa metode analisis data terdiri dari:

1. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif adalah analisis yang dapat dinyatakan dalam angka-angka dan dapat merupakan jawaban dari suatu peristiwa yang sulit diukur.

2. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah analisis yang dapat dinyatakan dalam angka-angka dapat dihitung dengan rumus statistik.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif yaitu dengan menganalisis dan menilai semua data yang diperoleh melalui perhitungan empiris dari objek penelitian serta membandingkan dengan teori-teori dan ketentuan yang

berlaku umum. Jadi analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis angka-angka dari perhitungan tersebut dengan menggunakan teori yang sesuai dengan masalah yang akan dibahas dalam analisis kuantitatif.

Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyajikan angka, tabel dan uraian mengenai rasio keuangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Pada gambaran umum Dinas Pendapatan Daerah ini, terlebih dahulu akan menjabarkan sejarah singkat berikut struktur organisasi yang menguraikan tugas dan fungsi bagian-bagian yang ada didalamnya, sehingga akan memberikan gambaran yang menyeluruh tentang kegiatan yang sedang diteliti serta mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan wewenang dan tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah. Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang beralamat Jl. Merdeka No. 55.

2. Struktur Organisasi

a. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas, Pendapatan Daerah.

Sebelum membahas lebih lanjut susunan organisasi serta uraian tugas dan fungsi masing-masing unit yang ada, sebaiknya diketahui terlebih dahulu mengenai kedudukan, tugas pokok dan



fungsi dari dinas pendapatan, pengolahan keuangan dan aset Daerah Kota Palembang.

Dinas Pendapatan Merupakan wujud Pelaksanaa kota palembang dibidang Pendapatan, Dimana Dinas Pendapatan Daerah kota Palembang yang di pimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Wali Kota Palembang melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pendapatan Mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan Dekonstralisasi dibidang Pendapatan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Dinas Pendapatan Daerah mempunyai Sebagai Berikut :

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Pendapatan Daerah.
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah.
- 3) Pelaksanaan dan Pembinaan di bidang pendapatan.
- 4) Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan sebagai kegiatan teknis operasional atau penunjang di bidang pendapatan Daerah.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

b. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota dan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Kota Palembang Terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris, Membawahi :
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b) Subbagian Keuangan
 - c) Subbagian Perlengkapan
- 3) Bidang Pendapatan Asli Daerah, membawahi :
 - a) Seksi Pendapatan dan Pendataan
 - b) Seksi Penetapan, Keberatan dan Penghapusan
 - c) Seksi Penangihan
- 4) Bidang Dana Perimbangan dan Penerimaan Lainnya, Membawahi :
 - a) Seksi Bagi Hasil Pajak
 - b) Seksi Bagi Hasil Bukan pajak
 - c) Seksi Penerimaan Lain-lain

- 5) **Bidang Anggaran, membawahi :**
 - a) **Seksi Belanja Tidak Langsung**
 - b) **Seksi Belanja Langsung**
 - c) **Seksi Penyusunan Program**
- 6) **Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Membawahi :**
 - a) **Seksi Pembukuan Pendapatan Daerah**
 - b) **Seksi Pembukuan Belanja daerah**
 - c) **Seksi Pelaporan**
- 7) **Bidang Pendaharaan, Membawahi :**
 - a) **Seksi Belanja Tidak Langsung**
 - b) **Seksi Belanja Langsung**
 - c) **Seksi Tutunan Perbendaharaan Ganti rugi**
- 8) **Bidang Verifikasi dan Pengendalian, Membawahi :**
 - a) **Seksi Verifikasi**
 - b) **Seksi Pembinaan**
 - c) **Seksi Hukum dan Perundang-undangan**

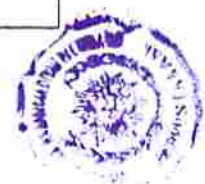
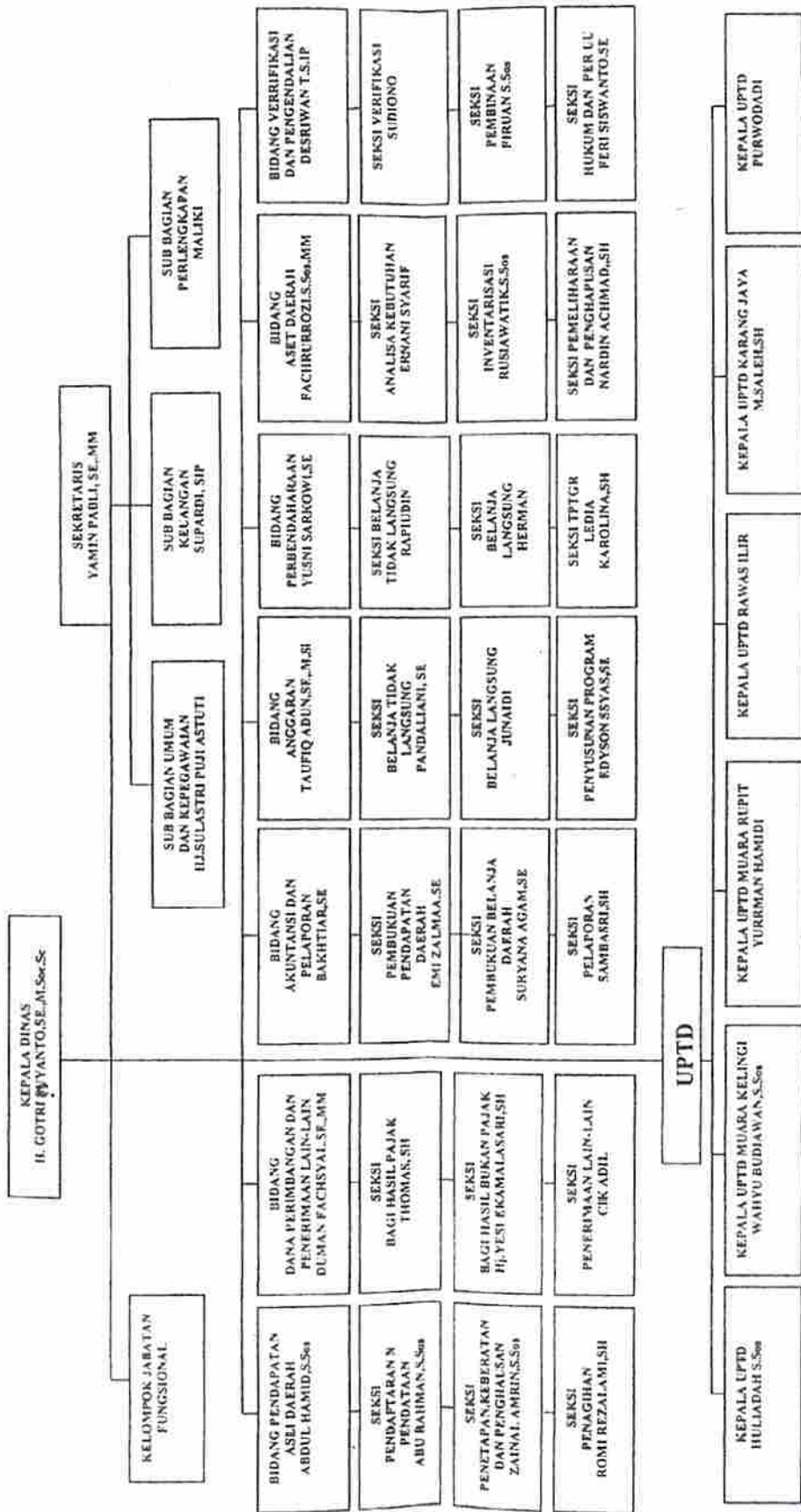
Susunan Organisasi diatas tampak akan lebih jelas apabila diterangkan dalam bagan organisasi, sehingga akan memberikan penjelasan yang mudah mengenai organisasi yang bersangkutan. Adapun bagan sususnan Dinas Pendapatan Kota Palembang :

- 9) **Bidang Verifikasi dan Pengendalian, membawahi:**
- a) **Seksi Verifikasi**
 - b) **Seksi Pembinaan**
 - c) **Seksi Pembinaan**
 - d) **Seksi Hukum dan Perundang-undangan**

Susunan organisasi diatas tampak akan lebih jelas apabila diterangkan dalam bagan organisasi, sehingga akan memberikan penjelasan yang mudah mengenai organisasi yang bersangkutan. Adapun bagan susunan Dinas Pendapatan Kota Palembang, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:

Barbar

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



c. Tugas dan Fungsi

Adapun Uraian tugas dan fungsi dari masing-masing unit yang ada di Dinas Pendapatan adalah sebagai Berikut :

1) Kepala Dinas

Tugas :

Kepala dinas Pendapatan Daerah Mempunyai tugas pokok membatu wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Pengolahan Keuangan daerah.

Fungsi :

- a) Perumusan Kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah.
- b) Penyelenggraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan umum di bidang pendapatan Daerah.
- c) Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaran urusan di bidang Pendpatan Daerah.
- d) Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan Daerah.
- e) Pengolahan Kesekretarian meliputi, Perencanaan Umum dan Keuangan.
- f) Pelaksanaan Pengawasan, evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan bidang Pendapatan, Pengolahan Keuangan.
- g) Pelaksanaa tugas lain yang diberikan oleh wali Kota sesuai dengan tugas dan Fungsinya.

2) Sekretariat

Tugas :

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, Program, Kepegawaian, keuangan dan Perlengkapan.

Fungsi :

- a) **Pengolahan administrasi perkantoran, administrasi Keuangan dan administrasi Kepegawaian.**
- b) **Penyelenggaraan urusan umum dan Perlengkapan, Keprotokolan dan hubungan masyarakat.**
- c) **Penyelenggaraan Ketetelaksanaan, Kearsipan dan perpustakaan Daerah.**
- d) **Pelaksanaan koordinasi, Pembinaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan pelaksanaan Kegiatan unit kerja di lingkungan.**
- e) **Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala dinas sesuai dengan tugas dan Fungsinya.**

Bagian sekretariat terdiri dari :

- a) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :**
 - (1) **Menyusun rencana kerja dan Pelaksanaa kegiatan urusan Umum dan Pengolahan administrasi kepegawaian.**

- (2) Melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumenan kegiatan dinas.
 - (3) Melaksanakan pengolahan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian, pengolahan kearsipan dan perpustakaan dinas.
 - (4) Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan penyiapan pengawain untuk mengikuti pendidikan / pelatihan.
 - (5) Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pengawai, tenaga teknis fungsional.
 - (6) Melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya.
 - (7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris, sesuai bidang tugasnya.
- b) Sub bagian keuangan mempunyai tugas :
- (1) Menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan DPPKAD
 - (2) Melaksanakan kegiatan pembendaharaan, verifikasi dan pembukuan anggaran keuangan DPPKAD
 - (3) Melaksanakan penyusunan laporan reliasasi keuangan secara berkala dan menyusun laporan akhir tahun

- (4) Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan.
 - (5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai bidang tugasnya.
- c) Sub bagian perlengkapan mempunyai tugas :
- (1) Menyusun rencana kerja dan melaksanakan kegiatan perlengkapan DPPKAD.
 - (2) Melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan, dan kebersihan di lingkungan kerja.
 - (3) Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor.
 - (4) Melaksakanan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan DPPKAD.
 - (5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai bidang tugasnya.

3) Bidang pendapatan asli daerah

Tugas :

Bidang pendapatan asli daerah mempunyai tugas merumuskan, menyusun kebijakan teknis dan melaksanakan pendataan,

penetapan, penagihan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah (PAD) lainnya.

Fungsi :

- a) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pendataan, penetapan, penagihan pajak dan retribusi serta PAD lainnya.
- b) Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan pajak dan retribusi.
- c) Perhitungan besarnya pajak dan retribusi, serta penyusunan data target penerimaan / PAD sesuai potensi yang ada.
- d) Penertiban surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah) dan surat ketetapan retribusi daerah (SKR-Daerah).
- e) Penertiban surat peringatan, teguran dan surat paksa kepada wajib retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f) Penerimaan dan pemrosesan usul keberatan dan bandling atas materi penetapan pajak dan retribusi.
- g) Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pengelolaan PAD.
- h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang pendapatan asli daerah, terdiri dari :

- (1) Seksi pendaftaran dan pendataan mempunyai tugas :
 - (a) Melaksanakan pendaftaran dan pendataan subjek / objek pajak dan retribusi serta PAD lainnya.

- (b) Memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan retribusi serta (NPWRD).
 - (c) Menghimpun dan memelihara data WP dan WR.
 - (d) Melakukan verifikasi lapangan terhadap data subjek dan objek WP dan WR.
 - (e) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya
- (2) Seksi penetapan, keberatan dan penghapus mempunyai tugas:
- (a) Menghitung dan menetapkan besarnya pajak dan retribusi.
 - (b) Menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak dan retribusi.
 - (c) Menertibkan dan mendistribusikan serta mengarsipkan surat ketetapan pajak dan retribusi.
 - (d) Memberikan nomor kahir pajak dan retribusi
 - (e) Menerima dan memproses usul keberatan dan bandling atas penetapan pajak dan retribusi.
 - (f) Menyiapkan keputusan atau menolak keberatan dan meneruskan penyelesain permohonan bandling ke majelis pertimbangan pajak.

(g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

(3) Seksi penagihan mempunyai tugas :

(a) Menyiapkan dan mendistribusikan surat ketetapan pajak, surat ketetapan retribusi dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan penagihan pajak dan retribusi.

(b) Melaksanakan penagihan pajak dan retribusi.

(c) Melaporkan hasil penagihan pajak dan retribusi.

(d) Menyiapkan surat teguran dan surat paksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

4) Bidang Dana Pertimbangan dan penerimaan Lain-Lain

Tugas :

Bidang perimbangan dan penerimaan Lain-lain mempunyai tugas menyusun rencana dan upaya peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan dan penerimaan Lain-lain.

Fungsi :

- a) **Penyusunan program dan kegiatan pengolahan dana perimbangan Lain-lain.**
- b) **Penghimpunana pedoman dan petunjuk teknis pengolahan penerimaan yang berasal dari dana perimbangan dan penerimaan lain-lain.**
- c) **Pelaksanaan kegiatan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan dan penerimaan lain-lain.**
- d) **Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka penerimaan maupun pencairan dana yang berasal dari dana perimbangan dan penerimaan lain-lain.**
- e) **Pendistribusian surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan (PBB) kepada wajib pajak.**
- f) **Pemberian bantuan kepada Kepala desa / Lurah dalam rangka penangihan PBB sektor pedesaan dan perkotaan.**
- g) **Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepada Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.**

Bidang perimbangan, terdiri dari :

- (1) Seksi Bagi Hasil Pajak mempunyai tugas :**
 - (a) Menghimpun data, pedoman dan petunjuk teknis pengolahan bagi hasil pajak.**
 - (b) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pemungutan PBB dan BPHTB.**
 - (c) Melaksanakan kegiatan penggalian potensi terhadap pendapatan yang bersumber dari penerimaan bagi hasil pajak.**
 - (d) Membantu Direktorat Jendral Pajak dalam rangka pendistribusian SPPT-PBB kepada para wajib.**
 - (e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.**
- (2) Seksi Bagi hasil bukan pajak mempunyai tugas :**
 - (a) Menghimpun data, pedoman dan petunjuk teknis pengolahan bagi hasil bukan pajak.**
 - (b) Menghimpun data, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan yang berkaitan dengan bagi hasil bukan pajak.**

- (c) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya peningkatan penerimaan bagi hasil bukan pajak, DAU dan DAK serta menyiapkan surat penerimaan pencairan dana yang berasal dari DAU dan DAK.
 - (d) Melaksanaksn tugas lain yang dibrikan oleh kepada bidang sesuai dengan tugasnya.
- (3) Seksi Penerimaan Lain-lain mempunyai tugas :
- (a) Menghimpun data, pedoman dan petunjuk teknis pengolahan penerimaan lain-lain.
 - (b) Melakukan koordinasi dengan instans terkait dalam rangka peningkatan penerimaan dan pencairan dana yang bersumber dari penerimaan lain-lain.
 - (c) Menyiapkan surat permintaan pencairan dana yang berasal dari penerimaan lain-lain.nnnnh,ju765mm
 - (d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepada bidang sesuai dengan tugsnya.

5) Bidang Anggaran

Tugas :

Bidang anggaran dan belanja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pengolahan di bidang Anggaran dan belanja Daerah.

Fungsi :

- a) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b) Penyiapan bahan dan Penyusunan petunjuk teknis di bidang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- c) Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga di bidang penyusunan dan pengolahan Anggaran dan Belanja Daerah.
- d) Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang Anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- e) Penyiapan bahan pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan pelaporan di bidang anggaran Pendapatan dan belanja.
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala dinas pendapatan, Pengolahan Keuangan dan Aset daerah.



Bidang Anggran, terdiri dari :

- (1) Seksi Belanja Tidak Langsung, mempunyai tugas :**
 - (a) Melakukan koordinasi atas revisi DPA-SKPD khusus belanja tidak langsung.**
 - (b) Melakaukan penelitian dan pencacatan terhadap permintaan SPD khusus belanja tidak langsung.**
 - (c) Membukukan kedalam register SPD dan Nota persctujuan Khusus belanja tidak langsung.**
 - (d) Meneruskan dan menyampaikan SPD dan nota persetujuan khusus tdakn alngsung yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada bidag perbendaharaan untuk diproses lebih lanjut.**
 - (e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepada bidang sesuai dengan tugasnya.**
- (2) Seksi Belanja Langsung mempunyai tugas :**
 - (a) Menyusun RAPBD dan RABD perubahan yang berasal dari belanja langung.**
 - (b) Melakukan koordinasi atas revisi DPA-SKPD khusus belanja lansung.**
 - (c) Melakaukan penelitian terhadap permintaab SPD khusus belanja lansung.**

- (d) Melakukan pencacatan terhadap permintaan SPD khusus belanja langsung.
 - (e) Membukukan kedalam register SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang khusus belanja langsung.
 - (f) Meneruskan dan menyampaikan SPD dan nota persetujuan khusus belanja langsung yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada bidang perbendaharaan untuk diproses lebih lanjut.
 - (g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada bidang sesuai dengan tugasnya.
- (3) Seksi Penyusunan Program
- (a) Menghimpun dan mengkoordinasikan rencana kerja anggaran dari SKPD.
 - (b) Menyusun RAPBD dan RAPBD Perubahan.
 - (c) Menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
 - (d) Menyusun nota keuangan RAPBD dan RAPBD Perubahan yang akan disampaikan ke DPRD.
 - (e) Melakukan koordinasi dengan Tim Perencanaan anggaran daerah.

- (f) Menyiapkan anggaran kas pemerintahan daerah.
- (g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepada bidang sesuai dengan tugasnya.

6) Bidang akuntansi dan Pelaporan

Tugas :

Bidang akuntansi dan pelaporan mempunyai tugas meruskan dan melaksanakan kebijakn teknis bidnag akuntansi keuangan daerah dan pelaporan dalam pengelolaan keuanagn daerah.

Fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan bidang akuntansi keuangan daerah dan pelaporan.
- b) Pelaksanaan pencatatan / pembukuan pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
- c) Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuanangan daerah.
- d) Penelitian dan pengevaluasi realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.
- e) Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban APBD.

- f) **Penyiapan bahan dalam rangka raat evaluasi penerimaan daerah.**
- g) **Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan laporan pelaksanaan anggaran secara berkala, yakni triulan, semesteran dan tahunan.**
- h) **Pengkoordinasi pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan unit akuntansi pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran.**
- i) **Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepada dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.**

Bidang akuntansi dan Pelaporab, terdiri dari :

- (1) **Seksi pembukuan pendapatn Daerah mempunyai tugas;**
 - a) **Melaksanakan pencatatan / pembukuan ketetapan, target dan realisasi penda-atan daerah.**
 - b) **Melakukan penelitian terhadap bukti kas / bank mengenai penerimaan daerah**
 - c) **Melakukan pencatatan / pembukuan penerimaan benda berharga.**
 - d) **Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugsnya.**

(2) Seksi pembukuan belanja Daerah mempunyai tugas :

- a) Melakukan pembukuan secara sistemastika dan kronologis serta meneliti dan memeriksa realisasi belanja daerah.**
- b) Melakukan penelitian terhadap bukti kas / bank mengenai belanja daerah.**
- c) Melakukan penelitain dan pemeriksaan proses pembukaan belanja daerah.**
- d) Melakukan koordinasi, Pembinaan, pengendalian dan evalusai pelaksanaan unit akuntansi pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran.**
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepada bidang sesuai dengan tugasnya.**

(3) Seksi pelaporan mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan pelporan target dan realisasi APBD.**
- b) Mempersiapkan bahan rapat, seminar, lokakarya di biang pendapatan daerah.**
- c) Menyusun bahan rangka penyususna laporan pelaksanaan anggran secra berkala, yakni triwulan, semesteran dan tahunan.**
- d) Melakuan koordinasi dan menyiapkan bahan dalam rangka perhitungan APBD**

- e) Menyiapkan data mengenai perkembangan realisasi APBD.
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

7) Bidang Perbendaharaan

Tugas :

Bidang perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang perbendaharaan

Fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan di bidang perbendaharaan.
- b) Pelaksanaan pemeriksaan kebenaran SPM beserta kelengkapannya yang disampaikan oleh SKPD.
- c) Penyelenggaraan penerbitan SP2D.
- d) Pengkoordinasi dan pembinaan teknis penyelenggaraan penata usahaan keuangan daerah dibidang perbendaharaan.
- e) Pelaksanaan penerimaan, menyimpan dan membayar uang daerah sebagai fungsi kas daerah.
- f) Penyiapan anggran kas, penyusunan laporan arus kas serta pengendalian pengeluaran kas daerah.

- g) Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah, baik dari sisi penerimaan kas, pengeluaran kas, maupun pembiayaan daerah.

Bidang Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas dari :

- (1) Seksi Belanja Tidak langsung mempunyai tugas :
- (a) Menerima dan meneliti berkas SPM khusus belanja tidak langsung beserta kelengkapannya, yang disampaikan oleh SKPD serta membina penatausahaan keuangan SKPD.
 - (b) Menyiapkan SP2D khusus belanja tidak langsung.
 - (c) Menerima, menyiapkan dan membayar uang daerah khusus belanja tidak langsung sebagai fungsi kas daerah.
 - (d) Menyiapkan anggaran kas, menyusun laporan arus kas, serta pengendalian pelaksanaan realisasi belanja tidak langsung.
 - (e) Mengusahakan dan mengatur dana khusus belanja tidak langsung, yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD.

(2) Seksi Belanja Langsung mempunyai tugas :

- (a) Memeriksa dan meneliti berkas SPM khusus belanja langsung beserta kelengkapannya, yang disampaikan oleh SKPD serta membina penatausahaan keuangan SKPD.**
- (b) Menyiapkan SP2D khusus belanja langsung.**
- (c) Menerima, menyiapkan dan membayar uang daerah khusus belanja langsung sebagai fungsi kas daerah.**
- (d) Menyiapkan anggaran kas, menyusun laporan arus kas, serta pengendalian pelaksanaan realisasi belanja langsung.**

(3) Seksi TPTGR mempunyai tugas :

- (a) Mengelola administrasi utang dan piutang daerah serta melakukan penangihan piutang daerah.**
- (b) Menginventasikan data ganti atas kerugian daerah.**
- (c) Melakukan tuntutan ganti rugi atas kerugian daerah.**
- (d) Melaksanakan pembinaan dan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penyelesaian ganti rugi daerah.**

- (e) Menyiapkan bahan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintahan daerah.
- (f) Menyiapkan pembentukan tim tutunan perbendaharaan dan tutunan ganti rugi (TPTGR)

8) Bidang Verifikasi dan Pengendalian

Tugas :

Bidang Verifikasi dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan tugas dibidang Verifikasi dan Pengendalian.

Fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaa verifikasi dan pengendalian penggunaan anggaran.
- b) Pelaksanaan Verifikasi terhadap bukti-bukti realisasi dan pengendalian penggunaan anggaran.
- c) Pelaksanaan pembinaan terhdapa pelaksanaan realisasi penggunaan anggaran.
- d) Penyusunan konsep RAPERDA tentang pajak daerah retribusi daerah. Peraturan Bupati yang berkaitan dengan penerimaan daerah.
- e) Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.

- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugasnya.

Bidang Verifikasi dan Pengendalian, terdiri dari :

- (1) Seksi Verifikasi mempunyai tugas :
- (a) Melakukan Verifikasi terhadap bukti-bukti realisasi anggaran belanja SKP
 - (b) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.
- (2) Seksi Pembinaan mempunyai tugas :
- (a) Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemungutan PAD.
 - (b) Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan realisasi penggunaan anggaran.
 - (c) Melakukan pengawasan terhadap penggunaan benda-benda berharga.
 - (d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

(3) Seksi Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas:

- (a) Mengimpun perturan dan perundang-undangan perpajakan dan realisasi daerah.
- (b) Melakukan koordinasi dengan dinas instansi terkait dalam rangka penyusunan RAPERDA tentang pajak daerah dan penerimaan daerah.
- (c) Menyusun konsep RAPERDA tentang pajak daerah dan retribusi daerah Bupati yang berkaitan dengan penerimaan daerah.
- (d) Melakukan Penyusunan / sosialisasi tentang pajak dan retribusi.
- (e) Melakukan penyuluhan / sosialisasi tentang pajak dan retribusi.
- (f) Melakukan koordinasi dengan dinas instansi terkait dalam rangka penegakan hukum.
- (g) Melakukan pengkajian sumber-sumber pendapatan daerah.
- (h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.



9) Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas :

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

d. Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengolahan Keuangan Daerah.

Tata Kerja yang terhadap didalam organisasi dinas Pendapatan, Pengolahan Keuangan Daerah Kota Palembang adalah :

- 1) Kepala dinas memimpin dan bertanggung jawab atas tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah yang dipimpin.
- 2) Dalam Melaksanakan tugas setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksana teknis dilingkungannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan
- 3) masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah dengan tugas masing-masing.
- 4) Setiap pemimoin satuan organisasi di lingkungan dinas daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan suatu petunjuk bagi pelaksan tugas bawahanya serta mengambil langkah-langkah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bila terjadi

penyimpangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi bawahannya.

- 5) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan di lingkungan dinas daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan menyiapkan laporan secara berjenjang.
- 6) Setiap laporan diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Tabel IV.1
Data Realisasi Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun 2009 - 2011

No	Keterangan	2009	2010	2011
1	Pendapatan Daerah			
	PAD	218.592.661.810,00	224.461.341.146,00	263.010.453.040,69
	• Pajak Daerah	87.485.932.360,00	91.500.000.000,00	146.570.109.735,00
	• Retribusi Daerah	64.629.000.000,00	68.237.902.273,00	62.795.550.515,69
	• Hasil Pengolahan Kekayaan daerah yang dipisahkan	10.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.570.000.000,00
	• Lain-lain pendapatan yang sah	56.477.729.450,00	39.723.438.873,00	28.074.792.790,00
	Dana Perimbangan	963.652.734.054,00	954.950.317.468,00	1.078.538.834.199,00
	• Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	262.774.112.054,00	229.936.278.468,00	243.246.554.199,00
	• Dana Alokasi Umum	689.108.622.000,00	696.587.039.000,00	787.613.180.000,00
	• Dana Alokasi Khusus	11.770.000.000,00	28.427.000.000,00	47.679.100.000,00
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	154.489.890.081,76	142.401.939.014,69	353.145.781.817,68
	Total Pendapatan Daerah	1.336.735.285.945,76	1.321.813.597.628,69	1.694.695.069.057,37
2	Belanja Daerah			
	c. Belanja Tidak Langsung	737.408.563.105,12	754.819.310.653,00	957.702.235.580,69
	5) Belanja Pegawai	716.177.659.105,12	735.772.310.653,00	916.264.660.580,69
	6) Belanja Hibah	2.100.000.000,00	2.675.000.000,00	26.651.075.000,00
	7) Belanja Bantuan Sosial	18.141.000.000,00	15.732.000.000,00	13.786.500.000,00
	8) Belanja Tak Terduga	989.904.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	d. Belanja Langsung	649.560.564.415,42	612.439.898.868,98	714.131.283.476,68
	4) Belanja Pegawai	102.470.541.692,00	79.263.758.194,14	73.254.918.876,00
	5) Belanja Barang dan Jasa	267.583.104.148,11	285.131.540.122,28	366.234.550.330,68
	6) Belanja Modal	279.506.918.575,31	248.044.600.552,56	274.641.814.270,00
	Total Belanja Surplus/(Defisit)	1.386.969.127.520,54 (50.233.841.574,78)	1.367.259.209.521,98 (45.445.611.893,29)	1.671.833.519.057,37 22.861.550.000,00

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah 2012

B. PEMBAHASAN

Secara garis besar dibahas pada bab ini yaitu menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Palembang dengan menggunakan metode *value for money*. Ketiga pokok bahasan dalam *value for money* yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas sangat terkait satu dengan yang lainnya. Perhitungan ini disajikan sebagai berikut:

1. Pengukuran Ekonomis

Ekonomis (kehematan) sebagai tingkat biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau memperoleh sesuatu. Untuk mengukur tingkat ekonomis dalam mengelola keuangan yaitu dengan melihat perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasinya dengan persentase tingkat pencapaiannya.

Kriteria ekonomi adalah :

- Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100$) berarti ekonomis.
- Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100$) berarti ekonomis berimbang.
- Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100$) berarti tidak ekonomis.

Tahun 2009

$$\text{Tingkat ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran} \times 100\%}{\text{Anggaran Pengeluaran}}$$

$$= \frac{1.232.983.076.011,00}{1.385.979.223.520,54} \times 100\%$$

$$= 88,96\%$$

Tahun 2010

$$\text{Tingkat ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran} \times 100\%}{\text{Anggaran Pengeluaran}}$$

$$= \frac{1.625.168.025.216,16}{1.517.380.634.514,11} \times 100\%$$

$$= 107,10\%$$

Tahun 2011

$$\text{Tingkat ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran} \times 100\%}{\text{Anggaran Pengeluaran}}$$

$$= \frac{1.249.205.067.729,64}{1.331.439.292.279,80} \times 100\%$$

$$= 93,82\%$$

Dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwa tingkat ekonomis Pemerintah Kota Palembang pada tahun 2009 menunjukkan angka 88,96% berarti pada tahun tersebut tingkat ekonomis sudah baik karena kurang dari 100%. Sedangkan pada tahun 2010 tingkat ekonomis belum mencapai 100% berarti belum ekonomis. Dan pada tahun 2011 menunjukkan angka 93,82% berarti sudah ekonomis.

2. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi (daya guna) berhubungan langsung dengan metode operasi (method operation). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil karya tertentu mempergunakan sumber daya dan dana serendah-rendahnya. Efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input. Untuk mengukur tingkat efisiensi dalam mengelola keuangan dengan melihat perbandingan antara realisasi anggaran pendapatan dengan anggaran pengeluaran. Output merupakan realisasi pendapatan dan input merupakan realisasi pengeluaran.

Kriteria efisiensi :

- Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100$) berarti efisiensi.
- Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100$) berarti efisiensi berimbang.
- Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100$) berarti tidak efisiensi.

Tahun 2009

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Biaya Untuk Mendapatkan PAD} \times 100\%}{\text{Realisasi PAD}}$$

$$= \frac{225.890.361.995,00 \times 100\%}{165.983.357.193,23}$$

$$= 136,09\%$$

Tahun 2010

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{\text{Realisasi Biaya Untuk Mendapatkan PAD} \times 100\%}{\text{Realisasi PAD}} \\ &= \frac{259.736.757.192,52 \times 100\%}{214.424.106.385,16} \\ &= 121,13\% \end{aligned}$$

Tahun 2011

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{\text{Realisasi Biaya Untuk Mendapatkan PAD} \times 100\%}{\text{Realisasi PAD}} \\ &= \frac{251.311.228.005,64 \times 100\%}{139.154.073.065,27} \\ &= 180,59\% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa dari tahun 2009-2011 angka perhitungan tingkat efisiensi menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kota Palembang belum menunjukkan hasil yang baik atau tidak efisien karena melebihi angka 100%.

3. Pengukuran Efektivitas

Efektivitas (hasil guna) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan outcome dan output.

Untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pengolahan keuangan dengan melihat perbandingan anggaran pendapatan dengan realisasinya dan persentase tingkat pencapaiannya.

Kriteria efektivitas adalah :

- Jika diperoleh diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100$) berarti efektif.
- Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100$) berarti efektif berimbang.
- Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100$) berarti tidak efektif.

Tahun 2009

$$\begin{aligned} \text{Tingkat efektifitas} &= \frac{\text{Realisasi pendapatan}}{\text{Anggaran pendapatan}} \times 100\% \\ &= \frac{165.983.357.193,23}{218.592.661.810,00} \times 100\% \\ &= 75,93\% \end{aligned}$$

Tahun 2010

$$\begin{aligned} \text{Tingkat efektifitas} &= \frac{\text{Realisasi pendapatan}}{\text{Anggaran pendapatan}} \times 100\% \\ &= \frac{214.424.106.385,16}{210.049.457.241,57} \times 100\% \\ &= 102,08\% \end{aligned}$$

Tahun 2011

$$\begin{aligned} \text{Tingkat efektifitas} &= \frac{\text{Realisasi pendapatan}}{\text{Anggaran pendapatan}} \times 100\% \\ &= \frac{139.154.073.065,27}{172.315.274.148,00} \times 100\% \\ &= 80,75\% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2009 angka perhitungan efektivitas adalah 75,93% hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas sudah berjalan dengan baik karena tidak mencapai 100%. Tetapi pada tahun 2010 hasil menunjukkan angka 102,08% hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas belum berjalan dengan baik karena angka melebihi 100%. Dan pada tahun 2011 menunjukkan angka 80,75% berarti tingkat efektivitas sudah berjalan dengan baik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dalam hal ini akan diberikan simpulan dan saran yang diperlukan mengenai rasio keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang maka penulis menarik beberapa Kesimpulan.

A. SIMPULAN

1. Tingkat ekonomis Pemerintah Kota Palembang sudah menunjukkan kinerja yang baik. Namun, pada tahun 2010 tingkat ekonomis melebihi angka 100% hal ini menunjukkan bahwa tingkat kinerja Kota Palembang kurang ekonomis.
2. Tingkat efisiensi Pemerintah Kota Palembang pada tahun 2009-2011 belum menunjukkan hasil yang efisien karena target efisiensi belum tercapai. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya angka perhitungan tingkat efisiensi yang melebihi angka 100%.
3. Tingkat efektivitas Pemerintah Kota Palembang dari tahun 2009-2011 sudah berjalan efektif. Namun, pada tahun 2010 kinerja pemerintah belum berjalan dengan baik, karena perhitungan tingkat efektivitas melebihi angka 100%.

B. SARAN

1. Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Palembang dalam meningkatkan kinerja serta mencapai tujuanj dan sasaran dapat menggunakan metode *value for money* untuk mengetahui tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektif keuangan mereka.
2. Pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang sebaiknya ikut melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan monitoring terhadap kegiatan pemungutan retribusi yang dilakukan oleh Dinas / Instansi yang berhubungan dengan retribusi daerah maupun pendapatan daerah dan bekerja sama dengan instansi yang terkait untuk memperbaiki sistem atau cara pemungutan retribusi.
3. Perlu adanya peningkatan kualitas bagi aparat keuangan, dalam hal ini khususnya para pemungut baik melalui pendidikan dan latihan administratif maupun yang bersifat teknis operasional.
4. Mengoptimalkan kerja tim intensifikasi Berdasarkan hasil analisis atas pemerintah Kota Palembang hendaknya dapat memenuhi kebutuhan dan untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan harus ditingkatkan dengan meningkatkan pendapatan asli khusus dalam rangka penigkatan pendapatan daerah secara efektif dan berkesinambungan guna memantau secara langsung kegiatan opsional pengelolaan pendapatan daerah di lapangan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2007. **Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah**, Penerbit salemba Empat.
- Halida, 2004. Pengukuran Kineja Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin Dengan menggunakan *value for money*.
- Jumingan. 2005. **Analisis Laporan Keuangan**, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Kuswandi. 2006. **Memahami value for money Bagi orang awam**. PT. Tiex Media Komputindo Gramedia, Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. **Akuntansi Sektor PUblik**, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mulyadi dan Jhony setiawan. **System Perencanaan dan Pengendalian Manajemen**, edisi kedua, cetakan pertama, salemba empat, Jakarta.
- M. Iqbal Hasan. 2003. **Materi statistik, edisi kedua**, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nan Lin, Alih Bahasa w. Gulo. 2002. **Metode Penelitian**, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Nur Indriantoro dan Bambang Sutomo. 2004. **Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen**, BPFE, Yogyakarta.
- SOfyhan Syafitri Harahap. 2008. **Analisis Kritis atas laporan keuangan**, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta.
- Sugiono. 2006. **Metode Penelitian Bisnis**, Cetakan kesembilan cv. Alfabeta, Bandung.
- Suherman Rosyidi. 2009. **Pengantar Teori Ekonomi**, Cetakan Kedelapan, Rajawali Pers, Jakarta.



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jalan Merdeka No.21 Palembang, Propinsi Sumatera Selatan
Telepon(0711)352282 Faximili(0711)317393 Kode Pos, 30132
E-Mail : Kepala@dispenda.palembang.go.id Website : wdispenda.palembang.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 070 / 90 /PENDA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Drs. H. BUKMAN LIAN, MM,M.Si

J a b a t a n : Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Menerangkan bahwa :

Nama : Dewi Anggraini

NIM : 22 2008 260

Telah melaksanakan Pengambilan Data pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Palembang, 01 Agustus 2012



Drs. H. BUKMAN LIAN, MM.,M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 195807161979121002





اسم الله الرحمن الرحيم

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : DEWI ANGGRAINI	PEMBIMBING
NIM : 22 2008 260	KETUA : Mizan, S.E, M.Si, Ak
JURUSAN : AKUNTANSI	ANGGOTA :
JUDUL SKRIPSI :	

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	1/2 - 2012	Pmb I, II, III	<i>[Signature]</i>		perbaiki sesuai
2					Saran!
3	3/2 - 2012	Pmb I, II, III	<i>[Signature]</i>		perbaiki sesuai
4					Saran awal
5					teori & operasional
6					hrs sebar!
7	4/8 2012		<i>[Signature]</i>		ditahan & direvisi
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

CATATAN:

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang

Pada tanggal : / /

a.n. Dekan

Ketua Jurusan

[Signature]
Drs. Sunardi, S.E, M.Si

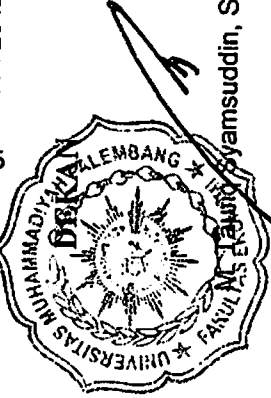


SURAT KETERANGAN TELAH MENGIKUTI TES TOEFL

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya ujian komprehensif di Fakultas Ekonomi UMP, maka mahasiswa dengan nama di bawah ini telah mengikuti tes TOEFL, untuk diperbolehkan sementara mendaftar pada ujian tersebut, yaitu :

NO	NAME	STUDENT NUMBER
1	Dewi Angraini	22-2008 260

Palembang, 31 Juli 2012



Syamsuddin, SE., Ak., M.Si

NB : (Surat keterangan ini dilaporkan asli, tidak boleh difotokopi)

BIODATA PENULIS

Nama : Dewi Anggraini

Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang/ 18 Februari 1990

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. Mayor zen lrg sidomulyo no.19 kec.kalidoni
Palembang

No. Telepon/ HP. : 0853 6879 2000

Pekerjaan : Mahasiswi

Nama Orang Tua

1. Ayah : Syaiful Bachri.T

2. Ibu : Sriwidowati

Alamat Orang Tua : Jl. Mayor zen lrg sidomulyo no.19 kec.kalidoni
Palembang

Palembang, Agustus 2012
Penulis

Dewi Anggraini

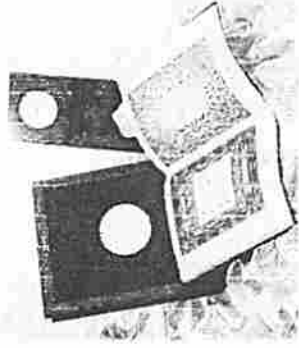
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : DEWI ANGGRAINI
NIM : 222008260
JURUSAN : Akuntansi



Yang dinyatakan LULUS Membaca dan Hafalan Al - Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan Predikat MEMUASKAN

Palembang, 04 Agustus 2012

an. Dekan

Pembantu Dekan IV



Hrs. Antoni, M.H.I.

Unggul dan Islami



DAFTAR NILAI

NAMA : DEWI ANGGRAINI
NIM : 222008260

NO	NAMA SURAT	SKOR NILAI
1	AL-FAJR	65
2	AL-BALAD	85
3	ASY-SYAM	75
4	AL-LAIL	75
5	AD-DHUHA	75
6	AL-INSYIRAH	75
7	AT-TIN	75
8	AL-ALAQ	60
9	AL-QADAR	75
10	AL-BAIYINAH	65
11	AL-ZALZALAH	100
12	AL-ADIIYAT	80
13	AL-QARFAH	90
14	AT-TAKATSUR	90
15	AL-ASHR	100
16	AL-HUMAZAH	80
17	AL-FIL	90
18	QURAI SY	100
19	AL-MA'UN	80
20	AL-KAUTSAR	100
21	AL-KAFIRUN	100
22	AN-NASHR	100
23	AL-LAHAB	100
24	AL-IKHLAS	100
25	AL-FALAQ	100
26	AN-NAS	100
NILAI RATA - RATA		86

PREDIKAT = MEMUASKAN